



# Partisipasi Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan di Pantai Watukarung Pacitan

Irfan Maulana Ashgaf<sup>1</sup>, Novi Sunu Sri Giriwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.

<sup>2</sup> Dosen Magister Arsitektur Lingkungan Binaan, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

| Diterima 24 Juni 2024 | Disetujui 22 Agustus 2024 | Diterbitkan 30 September 2024 |

| DOI <http://dx.doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.381> |

## Abstrak

Pembangunan dan transformasi di pedesaan merupakan dampak modernisasi yang perlu diwaspadai. Sebuah desa mengandung nilai-nilai budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan lingkungan binaan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi masyarakat dan mengetahui metode pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam pengembangan kawasan Watukarung. Temuan artikel ini terdapat dua hal utama antara lain pertama, tingkat partisipasi masyarakat kawasan pantai Watukarung berada pada tahap partisipasi dengan kolaborasi antar tiga pihak yaitu pemerintah sebagai kontrol peraturan perundangan dan kebijakan, pihak swasta sebagai pemilik modal usaha utama, dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menggerakkan roda investasi yang telah disepakati Bersama. Kedua, metode partisipasi yang digunakan oleh masyarakat setempat terbentuk oleh dua hal dasar yaitu kesadaran dan kemauan dengan bertumpu pada satu titik kebersamaan hegemoni sosial yaitu tercermin dengan metode partisipasi gotong royong. Kontribusi penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam membuat kebijakan pembangunan sehingga dapat terealisasi tepat guna antara program pemerintah terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berkembang secara spesifik sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan keberlanjutan ekologi.

**Kata-kunci:** partisipasi sosial; transformasi pedesaan; keberlanjutan ekonomi; pola spasial

## Community-Based Participation in Development at Watukarung Beach Pacitan

### Abstract

*Development and transformation in rural areas is an impact of modernisation that needs to be watched out for. A village contains cultural values closely related to social life and the built environment. This article uses a qualitative approach with descriptive methods to determine the level of community participation and the community empowerment methods used in developing the Watukarung area. The findings of this article are two main things, namely first, the level of community participation in the Watukarung coastal area is at the participation stage with collaboration between three parties, the government as control of laws and policies, the private sector as the main owner of business capital, and the community as the main actor in driving mutually agreed investment wheels. Second, the participation method used by the local community is formed by two basic things such as awareness and will, which rest on a single point reflected in the cooperation (gotong royong). The contribution of this research is used as a guide in making development policies so that government programs can be realized in an appropriate manner for the needs required by society to develop specifically following local socio-cultural conditions and ecological sustainability.*

**Keywords:** social participation; rural transformation; economic sustainability; spatial pattern

### Kontak Penulis

Irfan Maulan Ashgaf  
Magister Arsitektur Lingkungan Binaan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono No. 167 Kode pos 65145  
E-mail : [Irfanashgaf@student.ub.ac.id](mailto:Irfanashgaf@student.ub.ac.id)



## Pendahuluan

Tren perkembangan suatu kota banyak dijumpai dengan prinsip pemekaran wilayah, baik sektor perumahan maupun industri. Salah satu pengembangan kawasan pedesaan adalah sektor industri pariwisata yang menjadi penopang baru bagi perluasan pendapatan dan perkembangan kawasan pedesaan khususnya tepi pantai [1]. Pembangunan Berkelanjutan berakar pada piagam Brundtland pada tahun 1987 dengan pesan kuat “*Our Common Future*” [2]. Hal ini menunjukkan bahwa secara sadar terdapat kewajiban yang mengikat bagi seluruh masyarakat dunia saat ini untuk melestarikan alam serta melakukan pembangunan demi tersedianya sumber daya yang sama untuk generasi mendatang. SDGs memiliki 17 indikator yang beberapa di antaranya terkait dengan pembangunan pedesaan menuju pinggiran kota. Indikator terkait mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan inovasi industri dan infrastruktur, serta kota dan komunitas yang berkelanjutan [2].

Fenomena morfologi perkotaan tidak dapat dihindari berdampak juga terhadap kawasan pedesaan seperti spasial struktur ruang, penggunaan lahan, pola jalan, bangunan, dan ruang terbuka [3]. Hal ini memicu transformasi area pedesaan dimulai dari perubahan fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan pemukiman yang padat tentu menimbulkan banyak dampak, baik dampak negatif maupun positif. Dampak lingkungan yang timbul secara langsung berdampak kepada kondisi sosial masyarakat [4]. Masyarakat pedesaan yang bermukim di desa tersebut bersifat homogen dan memiliki fleksibilitas tinggi terhadap perubahan. Pernyataan tersebut diambil berdasarkan fakta lapangan bahwa perkembangan suatu desa cukup pesat bukan sebatas faktor globalisasi dan trend pembangunan tetapi terdapat kunci utama yaitu peran aktif masyarakat dalam mengembangkan kawasan bermukim mereka.

Pantai Watukarung adalah salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Pantai ini dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona, terutama karena pasir putihnya yang bersih dan air lautnya yang jernih dengan gradasi warna biru yang menawan. Selain itu, Pantai Watukarung juga dikenal sebagai salah satu lokasi yang cocok untuk olahraga selancar, baik bagi pemula maupun profesional, karena memiliki ombak yang cukup tinggi dan stabil [5].

Namun, meskipun memiliki potensi wisata yang tinggi, Pantai Watukarung masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjadi destinasi wisata unggulan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan.

Pertumbuhan industri pariwisata memang dapat memberikan manfaat ekonomi, namun juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata harus dilakukan dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Masalah dalam penataan ruang semakin kompleks dan perlu diwaspadai terutama terkait dengan para pelaku bisnis yang menggunakan dan memanfaatkan ruang secara berlebihan [6]. Industri pariwisata harus dikembangkan berorientasi terhadap paradigma berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam dan harmonisasi terhadap lingkungan binaannya.

Keberlanjutan tidak hanya berakar pada tiga subjek utama ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, namun juga terdapat satu unsur yang melingkupi ketiganya yaitu aspek budaya [7]. Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti telah menetapkan tiga aspek keberlanjutan yang dikaji pada penelitian ini yaitu poin 8 (*decent work and economic growth*), poin 11 (*sustainable cities and communities*), dan poin 17 (*partnership for the goals*). Pengambilan tiga poin keberlanjutan ini didasarkan kepada fakta empirik lapangan. Pertama, keterbatasan pendidikan dan mata pencaharian. Kedua, lokasi penelitian didominasi oleh komunitas pelaut yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ketiga, perpindahan kepemilikan tanah dan fungsi lahan kepada pihak asing diluar penduduk lokal. Keempat, permasalahan kebersihan lingkungan seperti pengelolaan sampah pribadi, dan sampah wisatawan. Terakhir, pengelolaan pantai yang belum maksimal sehingga menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi ditengah masyarakat tepi pantai Watukarung.

Sebuah bentuk pariwisata saat ini yang sedang berkembang adalah pariwisata berkelanjutan. Hal-hal yang dilingkupi oleh jenis pariwisata ini antara lain peningkatan kapasitas akomodasi (keberlanjutan ekonomi), populasi setempat (keberlanjutan sosial), dan kelestarian alam (keberlanjutan lingkungan) seperti tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini merupakan corak perkembangan dan investasi baru di sektor kepariwisataan yang seharusnya mampu memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap tren

kerusakan lingkungan alam [6]. Harapan dari program pembangunan kawasan pariwisata di Pantai Watukarung yang berbasis masyarakat adalah untuk mengembangkan pola tata ruang kawasan yang dinamis dan terintegrasi. Dinamis berarti mampu menyeimbangkan dengan kebutuhan ruang dan tuntutan aktivitas wisatawan. Sedangkan terintegrasi adalah pertumbuhan kawasan yang terstruktur baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.

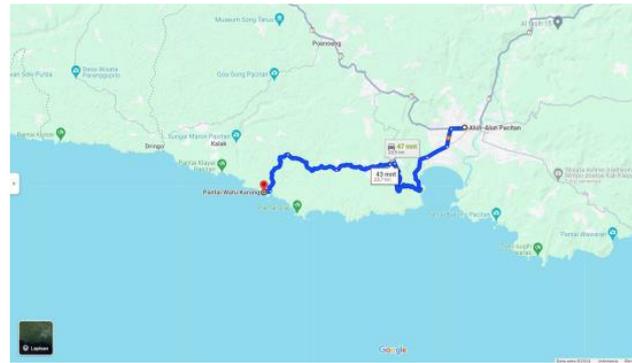
Masyarakat Watukarung dominan memiliki budaya sebagai pelaut sehingga berdampak pada keterampilan bertahan hidup baik dari aspek ekonomi sebagai nelayan, aspek sosial sebagai masyarakat komunal, aspek budaya membangun rumah dengan material alam dan cenderung sederhana, serta taraf pendidikan yang rata-rata tidak tamat SMA. Dengan latar belakang budaya pelaut ini membuat kawasan Watukarung kaya akan potensi baharinya mulai dari kekayaan kuliner sumber pangan, kekayaan atraksi melaut, surfing, hingga keterampilan dalam membuat iklim suasana tepi pantai yang berbeda dengan pantai-pantai pusat kota yang notabeneya terdiri dari masyarakat yang heterogen dan tidak memiliki ciri khas budaya hidup yang mampu menjadi daya tarik wisatawan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut dapat disimpulkan sebuah urgensi penelitian di kawasan Pantai Watukarung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan fenomena desa wisata dengan fokus pertama yaitu bagaimana tingkat partisipasi sosial dan apa metode partisipatif yang digunakan oleh masyarakat kawasan pantai Watukarung. Sehingga dapat diketahui lebih mendalam seperti apa tingkat partisipasi masyarakat dan metode partisipatif yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan kawasan pariwisata pantai tersebut.

## Metode

### Paradigma Penelitian

Paradigma pada penelitian ini bersifat naturalistic dengan bentuk deskriptif kualitatif [8]. Pemilihan sudut pandang ini karena data berbentuk verbal menjelaskan tingkat partisipasi sosial masyarakat dan dipaparkan secara nyata apa adanya. Lokus penelitian berada di Kawasan Desa Wisata Watukarung, Kecamatan Pringku, Kabupaten Pacitan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokus Makro Pantai Watukarung. (Sumber: Google Map)

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi langsung dan wawancara mendalam untuk mengamati objek dan subjek penelitian. Objek penelitian yang diamati adalah Desa Watukarung, dengan batas wilayah di Rt. 01/Rw. 06 dan Rt. 02/Rw. 06, Dusun Ketro, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan (Gambar 2). Penetapan batas wilayah ini bertujuan untuk memusatkan pengumpulan informasi mengenai partisipasi masyarakat di daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi yang berbatasan langsung dengan pantai di desa tersebut.



Gambar 2. Lokus Mikro Kawasan Desa Wisata Watukarung. (Sumber: Google Earth Pro)

Penelitian ini melibatkan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang warung, kepala dusun, serta perwakilan dari kelompok sadar wisata atau karang taruna. Narasumber dibagi menjadi dua kategori: narasumber kunci, yang terdiri dari kepala dusun atau wakilnya, dan narasumber pendukung, yang mencakup perwakilan kelompok karang taruna atau pokdarwis, serta para pedagang yang ada pada lokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi

verbal yang mendalam dan terperinci. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif sesuai dengan temuan empirik lapangan.

#### Temuan Pada Penelitian Sebelumnya

Pada sub bab ini dijelaskan metode pengumpulan data sekunder berupa hasil kajian dari penelitian sebelumnya. Didapatkan beberapa jurnal dan dokumen terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan fokus penelitian yaitu industri pariwisata dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dari topik penelitian dan hasil penelitian

terdahulu terdapat sebelas topik antara lain keberlanjutan budaya, visibilitas alam, dampak urbanisasi, system sanitasi, preservasi budaya, manajemen pembangunan, pengaruh stakeholder, lansekap urban, jalur pedestrian dan interaksi sosial. Kesebelas topik penelitian terdahulu tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat indikator spesifik yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian. Hal ini dapat lebih dipahami berdasarkan skema tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Temuan Pada Studi Penelitian Sebelumnya

Topik Penelitian	Indikator	Hasil Penelitian	Ref.
Keberlanjutan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Ekonomi</li> <li>Aspek Sosial</li> <li>Aspek Lingkungan</li> <li>Persepsi pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesinambungan budaya</li> <li>Vitalitas budaya</li> <li>Pergeseran perilaku</li> <li>Peningkatan kualitas tempat ketiga perkotaan</li> <li>Kesejahteraan hidup dan warisan budaya</li> </ul>	[9] & [10]
Visibilitas Keterhubungan Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biophilic parameters</li> <li>Space Syntax</li> <li>Nature Syntax</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan user dengan view alam</li> <li>Meningkatan kepekaan publik</li> <li>Desain yang berfokus pada psikologis</li> <li>Visual permeability</li> <li>Mobilitas dan Kemudahan pencapaian</li> </ul>	[11]
Dampak Urbanisasi Terhadap Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Architectural space network</li> <li>Social network</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungan ruang arsitektur merefleksikan kebijaksanaan dalam keberlangsungan hidup</li> <li>Jaringan sosial merefleksikan etik dan pluralisme budaya tradisional</li> <li>Pembangunan desa mempunyai sinergi dan integritas bagi masyarakat</li> </ul>	[12]
Pentingnya Sistem Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>SFD</li> <li>CSDA</li> <li>ECAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sistem instalasi pengolahan limbah</li> <li>Penyediaan layanan sanitasi kawasan</li> <li>Mengurangi emisi gas rumah kaca</li> </ul>	[13]
Managemen Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organization &amp; management</li> <li>Informasi proyek</li> <li>Behavior &amp; culture</li> <li>Teknologi</li> <li>Kepuasan Klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas pendidikan</li> <li>Pengalaman bekerja</li> <li>Komitmen kuat manajerial</li> <li>Keterlibatan pegawai</li> <li>Komunikasi yang tepat</li> <li>Perbaikan yang menerus</li> </ul>	[14] & [15]
Preservasi Heritage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memori kolektif</li> <li>Intangible heritage</li> <li>Tangible heritage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran lingkungan dalam kawasan cagar budaya</li> <li>Efektivitas strategi desain pasif tradisional</li> </ul>	[16] & [17]
Pengaruh Para Pemangku Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan memimpin</li> <li>Pengangguran</li> <li>Gender</li> <li>Profesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kerangka pengambilan keputusan</li> <li>Peran arsitek, stakeholder dan perencana di bidang desain</li> </ul>	[18] & [19]
Pembangunan Kawasan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek ekonomi</li> <li>Aspek ekologi</li> <li>Aspek budaya</li> <li>Aspek politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebersamaan antara politik dengan budaya</li> <li>Keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya</li> </ul>	[20]
Lansekap Urban	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek lingkungan</li> <li>Kelayakan hidup</li> <li>Nilai sosial</li> <li>View &amp; sensory experience</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan lahan</li> <li>Perawatan, produksi, &amp; dukungan teknis</li> <li>Siklus air yang baik</li> <li>Lansekap ekologi &amp; infrastruktur hijau</li> </ul>	[21]
Ketersediaan Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sirkulasi &amp; Perencanaan ruang</li> <li>Aksesibilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas dan integrasi sistem sirkulasi</li> <li>Organisasi ruang yang berdampak pada pengambilan keputusan jalur pergerakan</li> <li>Pusat informasi dan layanan pendukung</li> </ul>	[22]

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur sekuensial yang mendukung sirkulasi pejalan kaki</li> <li>• Jalur pedestrian yang ramah terhadap semua pengguna</li> </ul>	
Interaksi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efek sensorik</li> <li>• Elemen lansekap</li> <li>• Hubungan antara dua faktor sensorik dan lansekap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemisahan antara pintu masuk kendaraan dengan keberadaan pejalan kaki</li> <li>• Pejalan kaki harus diberikan ruang sosial yang didukung oleh elemen lansekap</li> </ul>	[23]

Berdasarkan dari penjelasan temuan topik penelitian dan hasil penelitian terdahulu muncul empat indikator spesifik. Indikator pertama merupakan Keberlanjutan Sosial-Budaya didalamnya terdapat keberlanjutan budaya, preservasi kebudayaan, dan interaksi sosial. Indikator kedua transformasi perdesaan didalamnya terdapat urban lanskap, dan ketersediaan jalur pedestrian. Indikator ketiga peran multi pemangku kebijakan terdiri dari peran stakeholder, manajemen pembangunan dan konstruksi, dan dampak pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian indikator keempat adalah keberlanjutan ekologi terdiri dari visibilitas keterhubungan dengan alam, sistem sanitasi, dan pembangunan berkelanjutan. Empat aspek tersebut menjadi indikator utama dalam penelitian kualitatif peneliti untuk mencari tingkat partisipasi sosial dan metode partisipatif masyarakat pantai Watukarung Pacitan. Hal ini dapat lebih dipahami berdasarkan skema gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Diagram Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (Sumber: Hasil analisis)

### Hasil dan Pembahasan

#### Tingkat Partisipasi Sosial Masyarakat

Pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat setempat. Salah satu masalah pokok dalam kehidupan bernegara adalah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerahnya (Pantasari & Romi, 2017). Masyarakat di pedesaan tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pemerintah Desa untuk mengemban tugasnya dengan efektif dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara menyeluruh digunakanlah sebuah prinsip keadilan. Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah melalui pelaksanaan pembangunan. Pembangunan Desa melibatkan tiga tahapan yang harus dijalani antara lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap ini pemerintah tidak bisa bergerak sendiri melainkan ada peran ikut serta masyarakat dalam mengawal jalannya program tersebut [24].

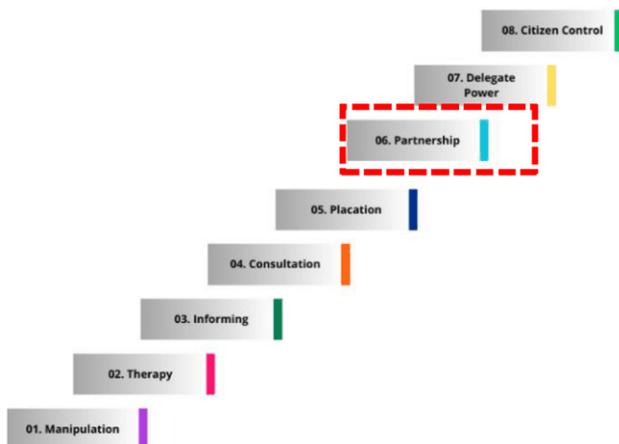
Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas dengan tujuan pencapaian tertentu yang bersifat sukarela [5]. Rentang partisipasi tersebut dibagi menjadi empat tahap yaitu 1) partisipasi proses perencanaan; 2) partisipasi pelaksanaan; 3) partisipasi pengawasan; dan 4) partisipasi pemanfaatan. Berdasarkan keempat rentang keikutsertaan partisipasi sosial ini masyarakat selain mengikuti proses pembangunan juga berhak untuk menikmati hasil-hasil dari program pembangunan desa tersebut [5].

Masyarakat secara definisi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sehingga memunculkan relasi sosial secara kontinu. Hasil observasi lapangan menunjukkan antusias masyarakat setempat cukup tinggi dengan ditandai oleh inisiasi pribadi mereka untuk melakukan perubahan pada kawasan Desa Wisata Watukarung. Berdasarkan hasil perolehan wawancara ditemukan ada tiga kelompok utama yang bergerak dalam pembangunan kawasan pariwisata Watukarung yaitu, 1) Warga lokal; 2) Pemerintah Dinas Pariwisata dan Olahraga; 3) Investor lokal maupun manca negara (Gambar 4). Warga lokal disini berperan aktif sebagai aktor utama dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan. Kemudian untuk pihak pemerintah hanya sebatas berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan desa. Terakhir pihak investor memiliki andil yang signifikan terhadap pembangunan desa antara pembuatan resort, cottage, dan beberapa villa. Investor juga menyewakan lahan untuk masyarakat setempat berjualan mendirikan kios tepi pantai.



Gambar 4. Taksonomi Pihak Partisipatif di Watukarung (Sumber: Hasil analisis)

Berdasarkan taksonomi pihak yang berperan aktif dalam pengembangan kawasan pantai Watukarung diatas maka dapat disimpulkan tingkat partisipasi sosialnya. Hasil tingkatan partisipasi sosial masyarakat di desa Watukarung berada pada tingkatan keenam yaitu *partnership* (Gambar 5). Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kehendak yang luas dalam menentukan aspek pembangunan desa seperti hak dalam mengelola tanah pribadi hingga hak menggunakan tanah sewa namun tidak seutuhnya berdikari. Pada proses pengembangan potensi desa terdapat kolaborasi dari berbagai pihak seperti pemerintah sebagai kontrol kebijakan, penyuluhan, dan pengayom serta investor sebagai pemegang modal utama pengembangan kawasan.



Gambar 5. Tingkat Partisipasi Sosial Masyarakat Desa Watukarung (Sumber: Hasil analisis)

### Metode Partisipasi Masyarakat Watukarung

Keterlibatan antar elemen masyarakat baik warga setempat, pemerintah daerah maupun investor berdampak signifikan kepada program pembangunan pariwisata Watukarung. Dampak yang dihasilkan antara lain munculnya indikator keberlangsungan perekonomian masyarakat dan berupaya

mengakomodasi kelestarian ekologi (manusia, alam, dan lingkungan binaan). Salah satu hal yang tercermin adalah tiga aspek keberlanjutan, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat lokal, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan melakukan pembangunan berbasis alam, yaitu pemanfaatan sumber daya alam sekitar dan aspek sosial-budaya mereka sebagai nelayan tidak hilang dan justru menambah ciri khas wisata Watukarung bernuansa kuliner *seafood*. Material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas wisata di desa Watukarung meliputi bambu, kayu, rotan, dan anyaman daun kelapa maupun elemen pelengkap lainnya.

Memperhatikan aksesibilitas desa tidak hanya akses jalan setapak tetapi juga pemulihan dan pelebaran pola jalan, pertumbuhan dan perubahan zona pemukiman dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata di dekatnya dan aktifnya masyarakat dalam program pelebaran akses jalan dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat unik yaitu terdapat kebebasan berpendapat dan bersikap dalam proyek rabat jalan desa. Apabila orang yang sebagian tanah terdampak pada pelebaran jalan maka cenderung untuk suka rela membangun cor beton badan jalan demi kemudahan akses menuju kawasan wisata. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa metode partisipasi yang terbentuk di masyarakat Watukarung didasarkan pada dua hal yaitu kesadaran, kemauan dalam bentuk semangat gotong royong. Kesadaran tercermin dari antusiasme masyarakat dalam berperan aktif pada sektor pariwisata seperti berdagang, menjajakan cinderamata hingga terlibat dalam proses pengelolaan pembayaran pariwisata masuk kawasan.



Gambar 6. Jenis Aktivitas Sosial Desa Watukarung (Sumber: Hasil analisis)

Kemauan tercermin pada sika masyarakat yang tidak hanya tinggal diam menerima nasib batuan dana desa,

melainkan berinisiatif dalam memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki. Hasil observasi memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat di Dusun Ketro memilih untuk memanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan secara bersamaan meningkatkan fasilitas baik akomodasi penginapan, amenitas warung makan maupun aksesibilitas lahan parkir (Gambar 6). Pembuatan lahan parkir semi permanen ini menggunakan material yang mudah untuk diaplikasikan dan praktis dipadukan dengan menyediakan sumber air bersih dan fasilitas peribadatan mampu mendorong penghasilan warga setempat dan indeks keberlanjutan pariwisata pantai Watukarung. Gambar 7 memperlihatkan bentuk kemauan dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

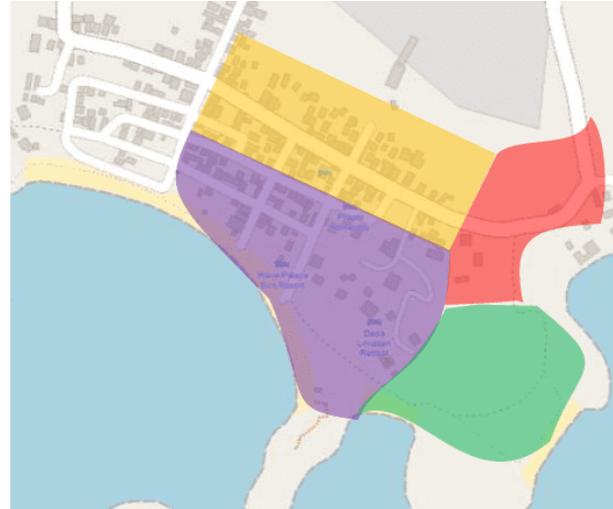


Gambar 7. Pemanfaatan Lahan untuk Perekonomian Warga (Sumber: Hasil analisis)

Berdasarkan penjelasan di atas didapatkan beberapa sebaran aktivitas dan pemanfaatan lahan perekonomian berbasis partisipasi masyarakat di Kawasan Desa Wisata Watukarung dengan keterangan A) warung makanan ringan; B) Kiosk souvenir pantai tengah; C) gelar tikar tepi pantai tengah; D) Kiosk souvenir pantai timur; E) aktivitas potret *surfing*; F) gelar tikar hutan kelapa; G) gelar tikar tepi pantai timur; H) loket masuk; I) warung makan seafood; J) Parkir kendaraan lahan warga; K) Parkir kendaraan tepi laut; L) Garasi parkir umum; M) Jembatan penyebrangan pantai timur dan tengah; N) Gazebo seafood pantai; O) Kios cinderamata pantai tengah; P) Toilet dan Mushola; Q) Stasiun pengisian Bahan Bakar Mini.

Masing-masing partisipasi sosial tersebut masuk dalam kategori aktif namun tetap mengacu kepada peraturan pemerintah baik dinas pariwisata, dinas sosial, dan diskusi dengan pihak swasta sehingga perkembangan perekonomian masyarakat watukarung mengalami kenaikan dan keberlanjutan

lingkungan pariwisata alam pantai terbentuk oleh kesadaran gotong royong antar pihak. Pola spasial yang terbentuk terbagi menjadi empat lapisan yaitu, lapisan pertama pintu masuk, lapisan kedua permukiman warga, dan lapisan ketiga tepi pantai (Gambar 8).



Gambar 8. Pola Spasial Zonasi Tata Guna Lahan di Watukarung (Sumber: Hasil analisis)

Pada lapisan pertama yaitu *entrance* (pintu masuk) berupa zona kedatangan wisatawan yang terhubung langsung dengan akses masuk utama pantai dan dikelola oleh petugas tiket dari pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata Kabupaten Pacitan. Pada lapisan kedua yaitu zona permukiman terdapat *minimarket* dan usaha UMKM lain serta beberapa *homestay* yang mencerminkan pola spasial gotong royong antara masyarakat dengan pihak swasta. Pihak swasta diuntungkan dengan investasi yang berjalan sedangkan masyarakat diuntungkan karena mampu mendongkrak angka pendapat dan kesejahteraan ekonomi mereka. Pada lapisan terakhir yaitu zona perdagangan dan jasa. Terdapat aktivitas gotong royong antara pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan peraturan dalam mengelola kebersihan dan tata ruang pantai kemudian pihak swasta berinvestasi dengan membangun *resort* dan *cottage* serta masyarakat berpartisipasi sebagai aktor utama dalam mengelola fasilitas perdagangan dan fasilitas umum yang telah terbangun dengan semangat kebersamaan. Kemudian pada lapisan keempat yaitu zona ruang terbuka hijau adalah bukit hutan pandan berada di sisi tenggara kawasan yang tetap terjaga lestari tanpa ada pembangunan yang signifikan.

Diperoleh sebuah benang merah pola spasial yang terbentuk adalah sebaran partisipasi aktif antara lain zona kedatangan (warna merah), zona permukiman

(warna kuning), zona perdagangan dan jasa (warna ungu) dan zona ruang terbuka hijau (warna hijau).

## Kesimpulan

Pembangunan dan transformasi desa akibat modernisasi menghadirkan berbagai tantangan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat temuan identifikasi empat tantangan utama dalam pengembangan desa wisata: aspek sosial-ekonomi, perubahan tata ruang, kelestarian ekologi, dan kemitraan multipihak. Partisipasi sosial masyarakat menjadi titik temu dari keempat tantangan ini, sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan budaya lokal, tata guna lahan, dan kelestarian lingkungan alam. Tingkat partisipasi sosial berada pada tahap partnership yang berarti terdapat kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah dan investor. Metode partisipasi yang terbentuk adalah gotong royong terjalin baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak swasta. Perhatian utama dalam pengembangan kawasan Watukarung kedepan perlu ditingkatkan peran pemerintah dalam mengatur kebijakan pembangunan dan modal dari investor diperjelas agar program pembangunan desa wisata dapat dilakukan dengan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat setempat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada industri pariwisata berkelanjutan pantai Watukarung.

## Daftar Pustaka

- [1] Y. Kong and J. Liu, "Sustainable port cities with coupling coordination and environmental efficiency," *Ocean Coast Manag.*, vol. 205, p. 105534, May 2021, doi: 10.1016/j.ocecoaman.2021.105534.
- [2] G. H. Brundtland, "Our Common Future ('The Brundtland Report'): World Commission on Environment and Development," in *The Top 50 Sustainability Books*, 2017, pp. 52–55.
- [3] D. Hameed Basee and Z. Riadh Abdulla, "Transformation of urban morphology, vulnerability and resilience: Haifa Street Area, as a case study," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 13, no. 4, p. 101718, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.asej.2022.101718.
- [4] H. Riaz, K. Iqbal Ahmad Khan, F. Ullah, M. Bilal Tahir, M. Alqurashi, and B. T. Alsulami, "Key factors for implementation of total quality management in construction Sector: A system dynamics approach," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 14, no. 3, p. 101903, Apr. 2023, doi: 10.1016/j.asej.2022.101903.
- [5] M. N. Pantasari and M. N. Romi, "ANALISA METODE PARTISIPAI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DESA," vol. 6, no. 3, p. 46, 2017, [Online]. Available: [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- [6] I. A. P. Widiati and I. Permatasari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung," *KERTHA WICAKSANA*, vol. 16, no. 1, pp. 35–44, Jan. 2022, doi: 10.22225/kw.16.1.2022.35-44.
- [7] H. W. Al-Shami, H. A. S. Al-Alwan, and T. A. Abdulkareem, "Cultural sustainability in urban third places: Assessing the impact of 'Co-operation in Science and Technology' in cultural third places," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 15, no. 3, p. 102465, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.asej.2023.102465.
- [8] J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta, 2014.
- [9] G. H. Brundtland, "Our Common Future ('The Brundtland Report'): World Commission on Environment and Development," *The Top 50 Sustainability Books*, pp. 52–55, 2017, doi: 10.4324/9781351279086-15.
- [10] H. W. Al-Shami, H. A. S. Al-Alwan, and T. A. Abdulkareem, "Cultural sustainability in urban third places: Assessing the impact of 'Co-operation in Science and Technology' in cultural third places," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 15, no. 3, 2024, doi: 10.1016/j.asej.2023.102465.
- [11] F. R. Yaseen and F. A. Mustafa, "Visibility of nature-connectedness in school buildings: An analytical study using biophilic parameters, space syntax, and space/nature syntax," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 14, no. 5, p. 101973, 2023, doi: 10.1016/j.asej.2022.101973.
- [12] H. Xiang, M. Xie, and Y. Fang, "Study on the architecture space-social network characteristics based on social network analysis: A case study of Anshun Tunpu settlement," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 15, no. 1, p. 102333, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102333>.
- [13] A. Hani Shukri, N. Shawkat Mizzouri, A. Saifadeen, D. Saleem, and M. O'Malley, "Assessing and improving the sanitation services in Kabarto 2 IDP camp using the Smart sanitation approach," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 15, no. 4, p. 102593, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102593>.
- [14] H. Riaz, K. Iqbal Ahmad Khan, F. Ullah, M. Bilal Tahir, M. Alqurashi, and B. T. Alsulami, "Key factors for implementation of total quality management in

- construction Sector: A system dynamics approach," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 14, no. 3, p. 101903, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101903>.
- [15] A. A. Abdallah, M. E. Shaawat, and A. S. Almohassen, "Causes of miscommunication leading to project delays and low work quality in the construction industry of Saudi Arabia," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 15, no. 3, p. 102447, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102447>.
- [16] I. Younus, W. Al-Hinkawi, and S. Lafta, "The role of historic building information modeling in the cultural resistance of liberated city," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 14, no. 10, p. 102191, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102191>.
- [17] M. M. Salameh, B. A. Touqan, J. Awad, and M. M. Salameh, "Heritage conservation as a bridge to sustainability assessing thermal performance and the preservation of identity through heritage conservation in the Mediterranean city of Nablus," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 13, no. 2, p. 101553, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.07.007>.
- [18] A. M. Hassan, Y. T. Negash, and F. Hanum, "An assessment of barriers to digital transformation in circular Construction: An application of stakeholder theory," *Ain Shams Engineering Journal*, p. 102787, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2024.102787>.
- [19] J. Guo, Y. Chen, D. Hao, and L. Zhang, "A multi-criteria decision-making approach to help resource-exhausted areas choose suitable transformation templates—The example of Wansheng in Chongqing, China," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 13, no. 5, p. 101709, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101709>.
- [20] A. Ragheb, R. Aly, and G. Ahmed, "Toward sustainable urban development of historical cities: Case study of Fouh City, Egypt," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 13, no. 1, p. 101520, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.06.006>.
- [21] D. K. Hassan, M. Hewidy, and M. A. El Fayoumi, "Productive urban landscape: Exploring urban agriculture multi-functionality practices to approach genuine quality of life in gated communities in Greater Cairo Region," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 13, no. 3, p. 101607, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.10.003>.
- [22] E. H. Fadel, L. M. Khodeir, and A. A. Nessim, "Design guidelines for pedestrian circulation requirements of multi-modal hub stations," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 14, no. 6, p. 102118, 2023, doi: [10.1016/j.asej.2023.102118](https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102118).
- [23] I. I. El-Darwish, "Enhancing outdoor campus design by utilizing space syntax theory for social interaction locations," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 13, no. 1, p. 101524, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.06.010>.
- [24] A. A. Abdallah, M. E. Shaawat, and A. S. Almohassen, "Causes of miscommunication leading to project delays and low work quality in the construction industry of Saudi Arabia," *Ain Shams Engineering Journal*, vol. 15, no. 3, p. 102447, Mar. 2024, doi: [10.1016/j.asej.2023.102447](https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102447).